

MASYARAKAT MADANI DAN SOSIALISME

Abu Tholib Khalik*

Abstrak

Masyarakat Madani menginginkan tegaknya demokrasi, keadilan hukum dan ekonomi yang Islami dalam berbagai sisi kehidupan. Sosialisme sebagai suatu faham baru yang muncul sebagai akibat dari ketidakadilan oleh pihak pemerintah dan pemihakan kalangan agamawan terhadap penguasa. Dalam hal kepemilikan, Sosialisme yang komunistis itu tidak memberi warga negara hak atas hak milik pribadi, sebaliknya Islam memberikan peluang besar kepada setiap pribadi untuk mempunyai hak milik hingga kepada masalah kewarisan sesuai dengan kemampuan masing – masing pribadi muslim untuk dapat memiliki harta kekayaan, itupun tidaklah semata – mata diperuntukkan bagi pemilikinya namun didalam sejumlah harta yang dimiliki seseorang itu ada bahagian hak dari kaum miskin yang harus ditunaikan dalam zakat. Konsep masyarakat madani (Islam) digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan *good government* yang dapat diartikan menciptakan suatu masyarakat yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada puncaknya akan terciptalah masyarakat adil dan makmur.

Kata Kunci: Masyarakat Madani, Sosialisme

Pendahuluan

Istilah *Sosialisme* terkadang dikait–kaitkan dengan Komunisme, walaupun pada hakikatnya hal itu tidaklah mesti, karena *sosialisme* itu kelihatannya sangat tergantung kepada ruang dan waktu. Demikian pula dengan penggunaan istilah Masyarakat Madani yang terkadang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris *Civil Society*.

Kata madani juga kata *hadharah*–digunakan oleh orang Arab untuk menerjemahkan istilah bahasa Inggris *civilization*. Justru pada

* Dosen Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

akhirnya kata madani yang berarti *civilization* yang sering dipakai dalam perbincangan kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks perangkat negara, madani juga memiliki arti sipil (bukan militer), sedangkan dalam konteks hukum, madani berarti bukan pidana.¹

Masyarakat Madani pada kebanyakan ahli – ahli ilmu politik Islam seperti Nurcholis Madjid dan Muhammad A.S. Hikam menganggapnya sebagai manifestasi dari ajaran Islam, sedangkan *Civil Society* dianggap sebagai sesuatu yang lebih berbau Sekuler. Hal ini disebabkan oleh tempat kelahiran istilah itu adalah di negara – negara barat, yang seolah–olah identik dengan *sekulerisme*. Tidak terkecuali dengan sosial-isme itu sendiri karena munculnya dari barat bahkan lebih populernya dihubungkan dengan Komunisme Atheis, karena tokoh yang sangat populer dalam hal ini adalah Karl Marx, walaupun sesungguhnya masih banyak tokoh lain yang mengembangkan teori ini masih ada juga nama F. Hegel dan lain – lain.

Memang kalau dilihat dari sisi sejarahnya Sosialisme itu lahir sebagai lawan dari Kapitalisme, tidak terkecuali Sosialisme ala Indonesia sebagai lawan dari kapitalisme yang berbaju imperialisme. Sepanjang sejarah di Indonesia orang yang paling terkenal mengembangkan sosialisme itu adalah Bung Karno (alm), sebagai istilah yang diexpose sedemikian kerasnya dalam upaya menggerakkan semangat Revolusi di kalangan rakyat Indonesia.

Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdiknas dalam dokumen Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Indonesia memerinci masyarakat madani Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri religius dan berbudi luhur, adil dan sejahtera, demokratis dan toleran, mandiri dan bertanggung jawab,

¹ Labib, Rohmat S., *Masyarakat Madani Dalam Perspektif Islam*, <http://c:/dokumen Settings>, 2010, diunduh 11 - 4 - 2011

Abu Tholib Khalik: MASYARAKAT MADANI ...

tertib dan teratur setara dan berkebersamaan, berintegritas dan berketanggungan daya, dinamis dan berorientasi kemasa depan. Inilah tipologi masyarakat ideal yang diidam– idamkan oleh masyarakat Indonesia sejak akhir abad ke XX yang lalu seiring dengan kondisi yang ada ada pada waktu itu yakni situasi menjelang detik detik berakhirnya era kekuasaan Orde Baru, hanya tentang kemungkinan biasa terwujud atautkah tidaknya masih dalam tandatanya besar.

Disekitar masalah ini Prof. Haryono Suyono juga mengemukakan, di tengah perubahan dan proses transformasi yang sangat cepat, untuk mempertahankan dalam kerangka membangun masyarakat yang sejahtera. Pancasila harus menempatkan diri pada posisi sesuai dengan tuntutan zaman. Menurut cara berpikir sederhana, sebagai pedoman agar diterima masyarakat dengan baik agar dimasyarakatkan melalui pendekatan positif, tanpa kebencian dan caci maki.

Sejarah Masyarakat Madani dan Sosialisme

Sosialisme

Sosialisme nampaknya berawal dari problema politik dikalangan muslim sebagaimana dinyatakan bahwa, pada tahun 869 M, muncul seseorang bernama ‘Ali bin Muhammad yang mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib tetapi dia bukan orang yang beraliran Syi’ah, dia berusaha menggerakkan kaum buruh yang kebanyakan dari bangsa Negro, juga para petani yang telah lama merasa terjepit, merreka telah melakukan pemberontakan yang juga didukung oleh orang–orang kota yang telah lama merasa resah dengan kondisi politik saat itu. Gerakan mereka cukup membuahkan hasil, walaupun

akhirnya bertepatan dengan 11 Agustus 883 M, pimpinan mereka tewas dan kepalanya dibawa ke Baghdad.²

Perjuangan ini tidak lantas berhenti seiring tewasnya pimpinan mereka, pada awal abad kesepuluh krisis sosial telah mengalami titik puncak, para petani yang tertindas dan kaum buruh serta budak yang telah lama memendam rasa dendam, sementara konsentrasi modal dan buruh telah menciptakan proletariat. Sekitar tahun 920–921 pengelolaan keuangan oleh wazir (Masa Abbasy) mengarah kepada keadaan pesta pora.³

Sungguhpun pada masa itu belumlah dikenal istilah Sosialisme yang sangat populer sejak abad ke XIX M setelah muncul beberapa tokoh seperti Karl Marx dan Lenin, akan tetapi dilihat dari sisi sifat dan modus perjuangannya apa yang dilakukan muslim pada abad IX hingga ke X itu memang layak digolongkan sebagai sosialis.

Kemudian pada abad XVIII muncul seorang pemikir Prancis yaitu Francois Babeuf yang berpendapat bahwa, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kekayaan yang ada dimuka bumi ini. Selanjutnya pada abad yang sama muncul pula Henri Saint Simon (1769–1825) yang menyarankan, agar hak waris dihapuskan, setiap orang harus bekerja dan resep bagi distribusi hasil – hasil produksi adalah tiap–tiap orang menurut kemampuannya dan untuk setiap orang menurut kebutuhannya.⁴

Nampaknya faham Sosialisme model Stalin memiliki ruh yang sama dengan model faham yang dikembangkan oleh Ali bin Muhammad diatas, hanya saja latar belakang historisnya yang berbeda, karena Stalin menganggap bahwa, kemungkinan proletariat

²Lewis, Bernard, *The Arabs in History, Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Pedomani Ilmu Jaya, 1988), h. 103-104.

³*Ibid.* h. 106

⁴Schmand, Henry J., *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 507

Abu Tholib Khalik: MASYARAKAT MADANI ...

meraih dan menggunakan kekuasaan dalam membangun masyarakat sosialis disuatu negara dengan bantuan dari proletariat dari negara – negara lain.⁵

Kemudian pad abad XX di Indonesia muncul tokoh pejuang dan politik seperti Soekarno, Hatta, yang menghimpun kaum tani dan buruh yang dalam istilah khas Bung Karno disebut Marhaenis, sehingga paham ini biasa disebut dengan istilah Marhaenisme, lalu sahabat dekatnya yang ahli ekonomi Bung Hatta memulai suatu konsep ekonomi yang di anggap murni Indonesia yakni Ekonomi Terpimpin, guna mewujudkan masyarakat adil makmur.

Tetapi ekonomi terpimpin yang lebih sesuai dalam konteks nasionalisme Indonesia ialah ekonomi bercorak sosialis, yang berkehendak melaksanakan cita – cita demokrasi ekonomi. Dengan diimbangi demokrasi ekonomi, maka demokrasi politik akan mengurangi sifat individualismenya yang kelewat besar dan tidak sesuai dengan asas – asas kolektivisme. Dalam sistem ekonomi terpimpin bercorak sosialis, campur tangan negara terbatas dan peranan individu tidak sepenuhnya dimusnahkan, hanya saja gerak mereka dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang – undangan demi melindungi kepentingan masyarakat umum.⁶

Dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat inilah faham sosialisme yang juga bisa muncul dalam bentuk komunisme itu dengan ciri khas ajarannya ialah kesamarataan, membebaskan kaum tani dan buruh dari penghisapan kapitalis. Sosialisme ala Indonesia muncul dengan tujuan akan membebaskan kaum buruh dan petani yang hidupnya selalu tertindas oleh kaum kapitalis yang imprialis itu, dengan jiwa Islami yang tak dapat dipisahkan darinya yaitu “Adil”.

⁵ *Ibid.h.* 559

⁶Hatta, *The basis of Indonesia economy*, <http://ridhoyahya89.blogspot.com/200907>, diunduh 14 – 10 – 2010

Dengan bentuk neo-imperialisme dan neo-kolonialisme, konsepsi sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi mendapatkan tantangan baru, apakah mampu menjawab atau mengalami stagnasi analisis didalamnya alias frigid dengan kondisi zaman? Telaah-telaah mendasar atas bentuk baru imperialisme harus mendapatkan porsi lebih untuk membentuk analisis kritis, menjawab tantangan zaman, dan merefleksikan zaman sesuai dengan kondisi social masyarakat yang terjadi.

Disamping itu secara kultural masyarakat Indonesia adalah masyarakat demokratis, karena pada tingkat desa ada “rembug desa”. Dikalangan masyarakat adat ada rembug adat dengan berbagai istilah lokalnya. Oleh karena itu sistim demokrasi di negeri ini bukanlah cerita baru, yakni sesuatu yang memang telah lama hidup dan mengakar dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Disinilah letak perbedaan asasi antara sosialisme ala Indonesia dengan ruh sosialisme yang asli yakni, Sosialisme dengan landasan materialisme dan dialektika materialisme sesungguhnya berbeda jauh dengan konsep Islam yang lebih kepada pendekatan transedental.⁷ Oleh sebab itu maka patut ditarik konklusi bahwa antara sosialisme ala Indonesia dengan sosialisme yang berada di luar Indonesia atau tegasnya sosialisme ala Stalin sungguh jauh berbeda. Hanya saja kalangan yang anti atau mungkin kurang mengerti terhadap saripati dari konsep sosialisme ala Indonesia yang menafsirkan sosialisme dalam konsepsi Bung Karno itu adalah kalangan yang telah diracuni oleh kapitalis yang memang merupakan musuh bebuyutan dari sosialisme, bahkan bisa jadi penafsir – penafsir itu sendiri adalah pion – pion kapitalis modern yang dengan sengaja ingin membuang jauh – jauh konsepsi ke Indonesiaan.

Tercatat pula, bahwa tujuan utama digulingkannya Presiden Sukarno pada tahun 1965, adalah untuk mencegah dilaksanakannya

⁷ Setiawan, Anton Agus, *Islam-Sosialisme-dan-Utopia-Masyarakat-Madani*, <http://filsafat.kompasiana.com>. Diunduh 17 – 08 – 2010

Abu Tholib Khalik: MASYARAKAT MADANI ...

cita-cita beliau yang ingin memberlakukan SOSIALISME INDONESIA. Presiden Soekarno hendak menegakkan Indonesia yang berkedaulatan nasional, bebas melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif melawan imperialisme dan menegakkan perdamaian dunia, berdikari dibidang ekonomi, serta berkepribadian Indonesia dibidang kebudayaan. Cita-cita ini bukanlah sesuatu yang muncul tanpa sebab, namun sepanjang sejarah sosialisme sebagaimana dikembangkan oleh Soekarno itu dalam rangka membebaskan Indonesia dari cengkaman kolonialis Belanda.

Akan tetapi sekitar zaman Orde Baru (ORBA) ada tafsiran bahwa setiap Sosialis itu adalah Komunis, padahal Sosialisme Indonesia adalah "sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi – kondisi yang terdapat dalam psikologi dan kebudayaan asli dari rakyat Indonesia."⁸ Oleh karena sebagaimana dikenal dikalangan kaum cendekia bahwa imperialis yang pernah bercokol di Indonesia adalah imperialis yang kapitalistik.

Pada hal essensi cita-cita Sosialisme Indonesia itu, Sosialisme yang menghendaki kemerdekaan, persaudaraan dan persamaan diseluruh umat manusia, Sosialisme yang sesuai dengan Pancasila, yang merupakan nilai-nilai luhur asli Bangsa Indonesia bukan seperti gambarannya Sosialisme yang selama ini disalah tafsirkan oleh golongan tertentu.⁹ Dengan bentuk neo-imperialisme dan neo-kolonialisme, konsepsi sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi mendapatkan tantangan baru, apakah mampu menjawab atau mengalami stagnasi analisis didalamnya alias frigid dengan kondisi zaman? Telaah-telaah mendasar atas bentuk baru imperialisme harus mendapatkan porsi lebih untuk membentuk analisis kritis, menjawab

⁸Anonim, *Marxisme: Ilmu Dan Amalnya*, <http://www.syarikat.org/content>, diunduh 20 – 10 – 2010.

⁹Guritno, Herman, 2008, *Sosilaisme Indonesia*, <http://solindo.wordpress.com>, 2008. h. 7 Diunduh 11 - 4 – 2011.

tantangan zaman, dan merefleksikan zaman sesuai dengan kondisi social masyarakat yang terjadi.¹⁰ Memang cukup banyak pertentangan jalan pikiran yang berkembang di Indonesia pada dekade terakhir abad XX yang lalu, satu pihak menghendaki pencerahan dan dilain pihak pihak ingin mempertahankan status quo yang lebih pro kepada dominasi pemerintahan Orde Baru.

Masyarakat Madani.

Masyarakat Madani, dikalangan masyarakat Indonesia mulai populer sejak akhir abad ke XX, dengan tokoh – tokoh terkemukanya seperti Nurcholis Madjid, Amin Rais dan lain –lain, Menurut Heru Nugroho penggunaan istilah *civil society* tersebut pada awalnya dikenalkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Scotlandia Adam Ferguson. Secara sederhana Ferguson mendefenisikan istilah *civil society* sebagai “suatu masyarakat beradab yang sudah lebih maju dari masyarakat pedalaman”. Sebuah pengertian yang secara gradual mengacu kepada pengertian “sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga otonom yang dapat mengimbangi kekuasaan Negara.”¹¹ Akan tetapi tidak dapat disamakan dengan pendapat para ilmuwan lainnya yang menganggap bahwa *civil society* itu sebagai suatu keadaan dimana masyarakat *vis a vis* dengan negara.

Nurcholish Madjid yang mencoba melihat *civil society* berkaitan dengan masyarakat kota Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Menurutnya, Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar – dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa baru dimulai dengan *The Toleration Act of 1689*.¹²

Kutipan diatas memberi kesan bahwa masyarakat madani itu pada kutipan pertama, masyarakat yang madani itu adalah suatu

¹⁰ Setiawan, Anton Agus., *Op.Cit.* h. 2-3

¹¹ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 5

¹² Anonim. *Op.Cit.* h. 5

Abu Tholib Khalik: MASYARAKAT MADANI ...

masyarakat yang terbebas dari penindasan penguasa. Kemudian dari kutipan kedua memberi kesan baik penguasa (pemerintah) maupun masyarakatnya sadar hukum yang berarti taat pada hukum, serta rukun damai antar sesama walaupun diantara mereka berbeda keyakinan (agama) ras dan sebagainya.

Munculnya konsep masyarakat madani menunjukkan para intelektual muslim telah mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern, tepatnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep *civil society* yang lahir di Barat pada abad ke-18. Konsep masyarakat madani digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan *good government*, menggantikan bangunan Orde Baru yang menjadi penyebab bangsa Indonesia terpuruk dalam krisis multidimensional yang tak berkesudahan.¹³ Memang harus diakui bahwa antara *civil society* dan masyarakat madani, ada sisi perbedaan dan juga ada sisi persamaan, lantas pada sisi kesamaan ini seperti demokratis, dan bersifat ukhuwah yang relevan dengan ajaran Islam itu terserap kedalam faham masyarakat madani.

Pendapat seorang filsuf Scotlandia Adam Ferguson yang mendefinisikan istilah *civil society* sebagai “suatu masyarakat beradab yang sudah lebih maju dari masyarakat pedalaman”. Sebuah pengertian yang secara gradual mengacu kepada pengertian “sebuah masyarakat yang terdiri atas lembaga otonom yang dapat mengimbangi kekuasaan Negara.”¹⁴

Dalam tatanan *civil society* yang demokratis, setiap individu diberikan kebebasan untuk bergerak diruang publik untuk menentukan afiliasi keagamaan dan sentimen lainnya. Oleh karena itu diberikan

¹³ Fauzia, Riva, *Masy. Madani : Dialog Islam dan Modernitas Indonesia*, <http://Rivafauziah.wordpress.com>, 2007, h. 3 Diunduh 11 - 4 - 2011.

¹⁴ Usman, Widodo, dkk., *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.15

kebebasan bagi partisipasi politik dalam pembuatan program dan kebijakan.¹⁵ Pendapat ini menggunakan istilah partisipasi politik, sebagai kata lain dari demokrasi, sehingga program pembangunan yang dibangun oleh pemerintah Indonesia Pasca Orde Baru tidak bersifat *top down* tetapi justru bersifat *bottom up*.

Civil Society yang terkadang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan arti Masyarakat Sipil, dan realitanya konsep masyarakat sipil sebenarnya masih merupakan bentuk turunan dari konsep demokrasi. Sebab, konsep masyarakat sipil masih belum beranjak dari ide dasar demokrasi, yakni kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian dari para pakar yang telah dikutip diatas dengan versinya masing – masing patut saja kalau disini ditarik suatu pemahaman yang berciri ke Indonesiaan yakni, masyarakat madani (*civil society*) itu adalah suatu masyarakat yang memiliki kemerdekaan penuh dalam menentukan jalan hidup bangsa yang bersangkutan, bebas dari tekanan pihak pemerintah, namun segala hal ihwal dalam kehidupan bernegara itu dilandasi oleh hukum yang berkeadilan.

Karena dalam kehidupan politik, ekonomi dan hak untuk menentukan kepemimpinan negara itu tidak keluar dari koridor hukum. Untuk Indonesia ruh dari hukum itu sendiri hanya Pancasila yang dipahami secara murni dan konsekwen, tidak melenceng dari sumber – sumber aslinya yakni budaya bangsa Indonesia. Maka dari itu sangatlah keliru jika ada pihak yang menganggap bahwa sosialisme ala Indonesia itu adalah sama persis dengan sosialisme yang berkembang di negeri – negeri barat atau yang terdapat dalam konsepsi para cendekiawan maupun para filosof barat. Alasannya penulis yakin dengan teori Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa

¹⁵ Dwipayana, Ari, *Memperkuat Civil Society Memperkuat Daya Kewargaan*, ari dwipayana-<http://lkis.or.id>, 2008, h.6 Diunduh 14 – 10 – 2010.

Abu Tholib Khalik: MASYARAKAT MADANI ...

“bentuk itu mesti sesuai materi”, berarti adalah suatu kemustahilan untuk dapat menerapkan suatu ideologi yang nyata – nyata kontradiksi dengan budaya masyarakat dimana ideologi itu akan diterapkan.

Masyarakat Indonesia yang sejak zaman dahulu kala sudah nyata–nyata sebagai masyarakat yang “religius” lantas harus diarahkan kepada suatu ideologi yang kontradiksi dengan hati nuraninya, niscahnya arahan itu agal mengalami kegagalan total, sebab masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim, tentu alam pikirannya tidak akan berjauhan dari nilai – nilai Islam.

Sosialisme Islam adalah sebuah makna lama tapi baru, karena istilah ini muncul sejak tahun 1950-an. Bermula dari beberapa anak-anak muda Muslim dari Arab dan Afrika yang mendapat didikan dari Moskow, setelah kembali ke negaranya mereka tidak puas terhadap pemerintahannya yang monarki namun cenderung liberalis.¹⁶ Inilah karakter pembaharuan yang sudah berlaku di negara muslim seperti Libya, dan nampak juga telah memberi inspirasi kepada kaum pembaharu Indonesia pada dekade terakhir abad ke dua puluh yang lalu, sungguhpun dalam realitanya memang tidak sama persis antara yang terjadi di Libya dengan apa yang terjadi di Indonesia pada era kelahiran reformasi

Nilai-Nilai Masyarakat Madani Dalam Sosialisme

Di kalangan akademisi Indonesia, hampir *civil society* ini lepas dari kritik. Bahkan ada yang memahami bahwa *civil society* sepadan dengan masyarakat Madani.¹⁷ Lebih lanjut Kholily mengatakan, seiring meletusnya Revolusi Prancis pada tahun 1789, tumbuhlah sistem pemerintahan demokratik dan ekonomi kapitalistik–menggantikan sistem monarki yang didominasi agamawan dan gereja,

¹⁶ Setiawan, *Op.Cit.* h.3

¹⁷ Kholily Hasib, *Civil Society Bukan Masyarakat Madani*, <http://www.hidayatullah.com>, 2010. h.1 Diunduh 24 – 03 – 2011

lahirlah ide masyarakat demokratis, bebas, pluralistik, dan toleran. Sifat demokratis, bebas pluralistik dan toleran ini merupakan sumber keharmonisan dari masyarakat suatu Negara. jika terjadi disharmoni dalam suatu Negara, maka patut diyakini bahwa kesejahteraan sosial sulit untuk terwujud, karena disharmoni dapat menggoyahkan stabilitas Negara yang bersangkutan. Sistem sosial yang dikenal dengan *civil society* ini, tokoh-tokohnya antara lain Adam Seligman, Tocquville, Thomas Paine, Adam Ferguson, Yohanes Locke, dan JJ. Rousseau.

Konsep *civil society* disini tidak dapat dilepaskan dari kesatuan organiknya dengan konsep – konsep Barat lainnya, seperti demokrasi, liberalisme, kapitalisme, rasionalisme, sekularisme dan individualism.¹⁸ Disinilah letak kelemahan *civil society* jika akan diabsorsi secara murni untuk diterapkan di Indonesia, sungguhpun dalam budaya asli Indonesia itu ada demokrasi yang lazim digunakan dari tingkat desa seperti rembug desa yang bebas dari tekanan-tekanan, bahkan sangat menghargai hak asasi manusia sebagai orang seorang maupun kelompok.

Sedangkan Masyarakat Madani, merupakan ungkapan dalam bahasa Arab, yang berarti masyarakat sipil yang demokratis dan religius. Dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan iman takwa, kritis argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan yang ada.

Suatu negara demokratis tidaklah mendiskriminasikan warganya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, politik, dan agama. Selain itu tidak ada diskriminasi dalam pemberian kesempatan untuk bekerja dalam menuju kepada kehidupan yang layak dan manusiawi, termasuk juga dalam hal mendapatkan pendidikan, dan berbagai sisi

¹⁸ *Ibid.* h.8

Abu Tholib Khalik: MASYARAKAT MADANI ...

kehidupan lainnya.

Diskriminasi adalah sebuah tindakan tidak adil yang akan membuat orang merasa tidak memiliki negara ini. Bila perasaan diperlakukan tidak adil ini dipelihara terus maka jangan diharapkan masyarakat yang terdiskriminasi ataupun termarginalkan itu akan terlibat dalam pembangunan.¹⁹

Sekilas tinjauan historis tentang pemberontakan dari sekelompok muslim terhadap khalifah Abbasy diatas memberi kesan bahwa gerakan yang dipimpin Ali bin Muhammad ini bermotif politis, kemudian kalangan yang dilibatkan dalam gerakan itu adalah kaum buruh dan petani, demikian pula dengan gerakan sosialisme barat yang melibatkan kaum buruh dan petani. Latar belakangnya pun juga sama yakni ketidak puasan terhadap kondisi politik yang ada pada masa itu.

Segi perbedaannya adalah pada Ali bin Muhammad yang akan mengejar kekuasaan pribadi, dan para petani serta buruh hanyalah semata – mata sebagai alatnya, kemudian tidak ada permasalahan antara pejuang itu dengan para ulama. Sedangkan sosialisme barat kaum buruhlah yang akan menjadi penguasa, dan rasa tidak puas mereka bukanlah semata – mata karena alasan politik, tetapi juga didorong oleh ketidak puasan mereka terhadap kaum agamawan Kristiani dengan doktrinnya yang memihak kepada pemerintah.

Pemihakan ini terjadi sebagai akibat penyelewengan kaum agama dari ajaran Nasrani yang sesungguhnya, sehingga lepas dari sifat adil dalam berbagai segi kehidupan. Oleh sebab itu seiring meletusnya Revolusi Prancis pada tahun 1789, tumbuhlah sistem pemerintahan demokratik– menggantikan sistem monarki yang

¹⁹ Ancok, Djamaludin, *Memperkuat Kepercayaan Menuju Indonesia Madani, Demokratis, dan Damai*, <http://ancok.staff.ugm.ac.id>, 2007. h. 8 Diunduh 20 – 11 – 2010

didominasi agamawan dan gereja –, akibatnya lahirlah suatu ide masyarakat demokratis, bebas, pluralistik, dan toleran. Sistem sosial ini dikenal dengan *civil society*.

Faktor inilah yang menjadi pembeda asasi antara *Civil Society* dengan apa yang disebut masyarakat Madani, kalau *Civil Society* cenderung menjauhi agama “Nasrani” sedang masyarakat madani wajib berlandaskan agama dalam hal ini Islam karena masyarakat madani dinisbahkan kepada system sosial pada era kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah.

Dalam berbagai segi seperti demokrasi, kepedulian terhadap kaum ekonomi lemah tidak ada perbedaan antara Sosilisme, *Civil Society* dan masyarakat madani, hanya saja landasannya memang jauh berbeda, antara Sosialisme dan *Civil Society* berperikeadilan berdasarkan rasio manusia, tetapi masyarakat madani sebagaimana diidam–idamkan para cendekiawan muslim seperti Noorcholis Majid dan kawan – kawan adalah suatu masyarakat yang berperikeadilan dengan berlandaskan kepada ajaran Islam.

Penutup

Setelah penulis melakukan telaah singkat terhadap Sosialisme dan Masyarakat Madani, bisa diringkaskan beberapa hal penting yang patut menjadi perhatian diantaranya:

1. Sosialisme sebagai suatu faham yang muncul dengan latarbelakang ketidakadilan oleh pihak pemerintah dan pemihakan kalangan agamawan terhadap penguasa.
2. Masyarakat Madani menginginkan tegaknya demokrasi, keadilan dalam hukum, ekonomi yang Islami (*religius*) dalam berbagai sisi kehidupan, sedangkan *civil society* kering dari nilai-nilai *religious* karena hanya berlandaskan hasil kajian logika dan budaya.
3. Dalam hal yang menyangkut kepemilikan, Sosialisme yang Komunistic itu tidak ada hak bagi warga Negara atas kepemilikan pribadi, sebaliknya Islam memberikan peluang besar kepada setiap

Abu Tholib Khalik: MASYARAKAT MADANI ...

- pribadi untuk mempunyai hak milik hingga kepada masalah kewarisan sesuai dengan kemampuan masing – masing pribadi muslim.
4. Konsep masyarakat madani (Islam) digunakan sebagai alternatif untuk mewujudkan *good government* yang dapat diartikan menciptakan suatu masyarakat harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada puncaknya akan terciptalah masyarakat adil dan makmur.

Daftar Pustaka

- Anonim, tt., *Marxisme: Ilmu Dan Amalnja*, <http://www.syarikat.org/content>, diunduh 20 – 10 – 2010.
- Ancok, Djamaludin, *Memperkuat Kepercayaan Menuju Indonesia Madani, Demokratis, dan Damai*, <http://ancok.staff.ugm.ac.id>, diunduh 20 – 11 – 2010.
- Dwipayana, Ari, *Memperkuat Civil Society Memperkuat Daya Kewargaan*, ari dwipayana-<http://lkis.or.id>, diunduh 14 – 10 – 2010.
- Eko, Sutoro. Ed, 2000, *Masyarakat Pasca Militer, Tantangan dan Peluang Militerisme di Indonesia*, IRE & Pact Indonesia, Jakarta.
- Fauzia, Riva, 2007, *Masy. Madani : Dialog Islam dan Modernitas Indonesia*, <http://Rivafauziah.wordpress.com>, diunduh 11 - 4 – 2011.
- Guritno, Herman, 2008, *Sosilaisme Indonesia*, <http://solindo.wordpress.com>, diunduh 11 - 4 – 2011.
- Hatta, tt, *The basis of Indonesia economy*, <http://ridhoyahya89.blogspot.com/200907>, diunduh 14 – 10 – 2010
- Howard, Williams, *Filsafat Politik Kant*, Jakarta: JP. Pers & DPP IMM, 2003.

Abu Thalib Khalik: MASYARAKAT MADANI DAN

- Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Kholily Hasib, *Civil Society Bukan Masyarakat Madani*, <http://www.hidayatullah.com>, diunduh 24 – 03 – 2011.
- Labib, Rohmat S, *Masyarakat Madani Dalam Perspektif Islam*, <http://c:/dokumen Settings>, diunduh 11 - 4 – 2011.
- Lewis, Bernard, *The Arabs in History*, Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Nurchahyo, Andik, *Masyarakat Madani (Civil Society) dan Pluralitas Agama Di Indonesia*, <http://islamkuno.com>, diunduh 08 – 09 – 2010.
- Schmand, Henry J, *Filsafat Politik*, Jigjakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Setiawan, Anton Agus, *Islam-Sosialisme-dan-Utopia-Masyarakat-Madani*, <http://filsafat.kompasiana.com>. Diunduh 17 – 08 – 2010.
- Usman, Widodo, dkk, ed., *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000.